

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT
INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

NAMA : URWATUL WUTSQA

NIM : 126232126

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : URWATUL WUTSQA

NIM : 126232126

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

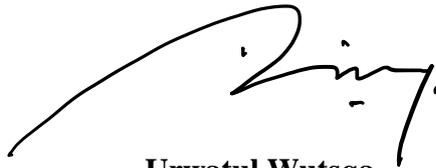
JAKARTA

2024

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Urwatul Wutsqa

126232126

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan audit internal oleh inspektorat dalam upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian studi kasus ini menggunakan responden dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi para pelaksana pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang disebar kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Analisis data menggunakan regresi sederhana dan berganda dengan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dari pengendalian internal dan audit internal dalam pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menurunkan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan perbaikan pada sistem pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal. Namun tentu saja terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dimana pencegahan penyimpangan atau kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak secara langsung terkait dengan model penelitian ini.

Kata Kunci: Pengendalian Internal; Audit Internal; Pencegahan *Fraud*; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of internal control and internal audit in efforts to prevent fraud in the process of procuring government goods/services. This case study research uses respondents from all SKPD which include implementers of goods and services procurement in the Rokan Hulu Regency Government. Data were obtained using questionnaires distributed to respondents who met the sample criteria. Data analysis using simple and multiple regression with the help of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) application. The results of the study indicate that there is a positive effect of internal control and internal audit in preventing fraud in the process of procuring goods/services. It is hoped that this research can be the basis for reducing the risk of irregularities in the process of procuring goods and services by making improvements to the internal control system and implementing internal audits. But of course there are limitations in this study where the prevention of irregularities or fraud in the procurement of government goods / services can be influenced by other factors that are not directly related to this research model.

Keywords: *Internal Control; Internal Audit; Fraud Prevention; Government Goods/Services Procurement*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Istri tercinta dan anak-anak tersayang untuk dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 9 Desember 2024

Urwatul Wutsqa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	3
ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.2. Hipotesis	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Sampel	18
3.2. Teknik Pengumpulan Data	18
3.3. Teknik Analisis Data	18
3.4. Pengujian Hipotesis	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Uji Instrumen Penelitian	24
4.2. Uji Asumsi Klasik	26
4.3. Analisis Regresi Linear Berganda	28
4.4. Uji Hipotesis	29
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	32
5.1. Simpulan	32
5.2. Saran	32
REFERENSI	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Uji Validitas	25
Tabel 4.2. Uji Reliabilitas	27
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	28
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolonieritas	28
Tabel 4.5. Uji Heteroskedastisitas	29
Tabel 4.6. Regresi Linear Berganda	29
Tabel 4.7. Hasil Uji F	31
Tabel 4.8. Hasil Uji t	32
Tabel 4.8. Koefisien Determinan (R^2)	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	19
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional baik tingkat pusat maupun daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. PBJ merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJ diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PBJ dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

PBJ yang menggunakan APBN/APBD memiliki risiko tinggi akan kecurangan atau *fraud* dalam prosesnya. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) selama tahun 2019 s.d. 2023 modus kecurangan dalam PBJ yang banyak terjadi diantaranya berupa kegiatan/proyek fiktif sebanyak 277 kasus dan *mark up* sebanyak 50 kasus. Kegiatan/proyek fiktif biasanya melibatkan beberapa pihak dalam proses PBJ, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan bendahara, sehingga kegiatan fiktif tersebut dapat disembunyikan. Tindakan *mark up* biasanya dilakukan pada saat menyusun HPS dengan menaikkan harga. Sedangkan berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama tahun 2004 s.d. 2023 dari 1.512 kasus perkara korupsi yang ditangani oleh KPK, diantaranya sebanyak 339 kasus merupakan perkara korupsi pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2005 s.d 2024, pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diketahui terdapat 422 temuan pemeriksaan dari pemeriksaan BPK. Dari jumlah tersebut sebanyak 102 temuan terkait pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang banyak terjadi adalah kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan kemalahan harga.

Dalam Perpres tentang PBJ disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses PBJ memiliki kewenangan berupa:

1. Keleluasaan untuk mengelola prosedur pengendalian pengadaan secara langsung.
2. Akses informasi langsung pada penyelenggaraan proses PBJ.
3. Akses informasi tidak langsung dan kewenangan terbatas pada pelaksanaan anggaran, sehingga dapat melakukan intervensi terbatas pada pelaksanaan anggaran.

Kewenangan tersebut di atas rawan disalahgunakan apalagi jika tidak terdapat bentuk pengendalian yang baik dan efektif.

Seseorang yang melakukan *Fraud*, biasanya memiliki akses ke aset atau mengelola prosedur pengendalian yang memungkinkan dilakukannya skema penipuan. Posisi seseorang dalam hal tanggung jawab dan wewenangnya juga berkontribusi pada peluang untuk melakukan kecurangan. *Fraud* terjadi karena individu menggunakan posisinya dan dengan sengaja mengabaikan pengendalian, serta menggunakan kewenangannya untuk menjalankan skema penipuan. Menurut ACFE (2018) hampir setengah dari semua kasus kecurangan terjadi terutama karena kurangnya pengendalian internal atau pengabaian terhadap pengendalian yang ada. Sedangkan menurut Wells (2014) tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko penipuan, tetapi pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif dapat mencegah Kecurangan, rata-rata dengan mengurangi peluang untuk melakukan penipuan dan meningkatkan persepsi deteksi. Oleh karena itu dalam upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam proses PBJ diperlukan suatu bentuk dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik dan efektif.

Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dari suatu struktur terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun laporan keuangannya lebih hati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi serta mengamankan harta organisasi. Tuanakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara penanggungjawab tata kelola, manajemen, serta karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risk*) dapat mengancam pencapaian tujuan entitas. Oleh karena itu pengendalian dimaksudkan sebagai respon atas mitigasi suatu ancaman atau kemungkinan terjadinya risiko, sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan aset organisasi dapat dideteksi secara dini. Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013) demi

tercapainya tujuan perusahaan, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus melalui sebuah sistem yang didesain untuk dapat mengarahkan, dan mengendalikan dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Selain pengendalian internal yang baik dan efektif, bentuk upaya pencegahan *fraud* adalah dengan melakukan audit internal. Audit internal sangat penting dalam suatu organisasi karena memiliki peran untuk melakukan pencegahan terjadinya tindakan *fraud*. Auditor internal sebagai orang yang independen seharusnya mampu untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap segala kecurangan dari segala aktivitas organisasi. Definisi audit internal yang dijelaskan oleh Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors*) yang dikutip dari (Suginam, 2017) adalah sebuah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah *value* dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal berperan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan disiplin dan sistematis sebagai upaya mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan. Menurut Saputra (2021) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang positif salah satunya dapat dengan memaksimalkan peran audit internal dengan melakukan *surprise* audit secara berkala.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk menguji "Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu", dengan tujuan agar nantinya dapat memberikan referensi dalam upaya pencegahan *fraud* khususnya dalam proses PBJ pada lingkup Pemerintah Daerah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah?
- b. Apakah Audit internal berpengaruh dalam mencegah tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya melakukan pencegahan tindakan *fraud* pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aresteria, Maya. (2018). *Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Di Perguruan Tinggi: Literature Review*. Jakarta/Semarang: Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis.
- Association of Certified *Fraud* Examiners. (2018). *Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse*. ASIA-PACIFIC EDITION.
- COSO. 1994. *Internal control intergrated framework*. New York: AIGPA' s Publication Devision.
- Gusnardi. (2011). *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan*. Jurnal Ekuitas 15 (1): 130-146.
- Handoyo, Bregitta Roemkenya Madolidi dan Bayunitri, Bunga Indah. (2021). *The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention Accounting Department*. International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM), ISSN 2656-3355, Vol 3, No 1.
- Hakim, Luqman Nul Hakim dan Suryatimur, Kartika Pradana. (2022). *Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud*. JIAKES Vol. 10 No. 3, 2022 pg. 523-532.
- Hermiyetti. (2010) *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. Jurnal akuntasni dan auditing, Vol 14, No 2.
- Hidayati, Nur dan Mulyadi, J.M.V. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* dalam Kegiatan Pengadaan Barang. JRAP, Vol. 4, No. 2.
- Larasati, Yarry Septia dan Surtikanti. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan)*. JAFTA, Vol 1, No 1.
- Lonto, Miryam Pingkan., Sukoharsono, Eko Ganis., Baridwan, Zaki., dan Prihatiningtias, Yeney Widya. (2023). *The Effectiveness of Internal Audit for Fraud Prevention*. AABFJ Volume 17, Issue 3.

- Mayangsari dan Wandanarum (2013). *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Jakarta: Media Bangsa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Puspitasari, Meliana dan Lukman, Randhi Pradana. (2021). *Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan*. Conference on Economic and Business Innovation Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol 1 No. 1.
- Redding, Kurt, F, Paul J. Sobel, dan Michael J. Head. (2013). *Internal auditing: assurance & advisory services*. Third Edition. Unites Stated Of America: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF).
- Saputra, Made Agus Adi. (2021). *Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh*. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, Edisi Oktober 2021, e-ISSN 2798-8961.
- Singleton. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition. Wiley Corporate.
- Soleman, Rusman. (2013). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud*. JAAI Volume 17 No. 1 Juni 2013: 57-74.
- Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing Edisi Kelima*. Pusdiklat BPKP: Jakarta.
- Suginam. (2017). *Pengaruh peran audit internal dan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud*. Riset & Jurnal Akuntansi, 1(1) e – ISSN : 2548 – 9224. p – ISSN : 2548 - 7507.
- Tuanakotta, T., M. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T., M. (2013). *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wells, Joseph T. (2014). *Principles Of Fraud Examination*. Fourth Edition, Willey.